

Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Karyawan PT. PUSRI Palembang

Anisa Listya¹, Patmawati^{1*}, Arista Hakiki¹, Sri Maryati¹, Yusnaini¹, Muhammad Ichsan Siregar¹,
Muhammad Farhan¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: patmawati@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 6 Desember 2021; Disetujui: 20 Februari 2022; Dipublikasi: 12 Maret 2022

Abstrak: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada bagian akuntansi dan keuangan Koperasi terutama bagi Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Metode kegiatan ini dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada staff akuntansi dan Manajer Akuntansi untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis database dan Local Area Network dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil pengabdian masyarakat ini ditandai dengan antusias dan kemampuan peserta dalam menerima materi dan mampu melakukan praktik untuk menggunakan aplikasi SIA ini untuk menyusun laporan keuangan. Hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang untuk meningkatkan pengelolaan transaksi keuangan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dari Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang,

Kata kunci: Koperasi, Sistem Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan, Database, *Local Area Network*.

Kutipan:

Listya, A., Patmawati, Hakiki, A., Maryati, S., Yusnaini, E., Siregar, M.I., & Farhan, M. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1): 73-80.

DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.88>

1. PENDAHULUAN

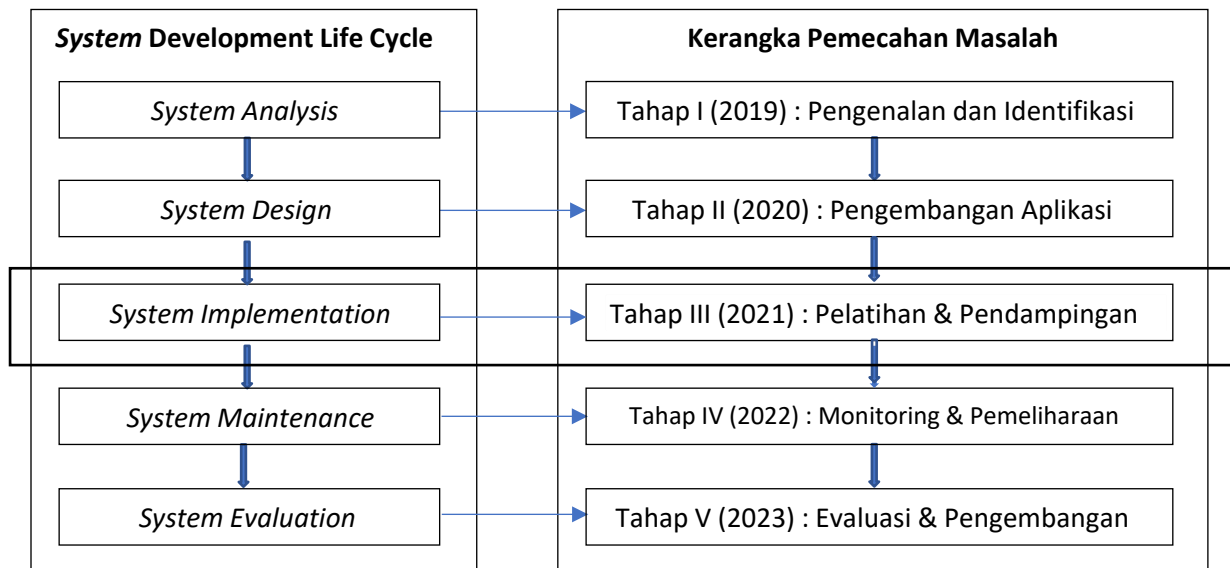
Koperasi merupakan kegiatan usaha yang berperan dalam proses peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Meskipun Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu hambatan yang paling mendominasi adalah mengenai permodalan. Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pusri Palembang merupakan koperasi serba usaha yang memiliki berbagai unit usaha diantaranya: usaha simpan pinjam, usaha air minum, usaha fotokopi, usaha service AC, sewa kendaraan, usaha toko, usaha *handling*, usaha jasa pengadaan tenaga kerja, dan usaha lain-lain. Setiap Badan Usaha pasti ingin mengetahui perkembangan dan

pertumbuhan usahanya, begitupun juga Kopkar PT Pusri. Apabila Kopkar PT Pusri ingin terus berkembang maka Kopkar PT Pusri harus melaksanakan aktivitasnya dengan baik agar tujuan utama berdirinya Kopkar PT Pusri dapat tercapai sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Koperasi Karyawan PT PUSRI Palembang perlu melakukan analisis tingkat kesehatan pada koperasi, agar dapat mengelola dana dengan baik serta dapat menjaga kesehatan kinerja keuangannya melalui penyusunan laporan keuangan yang memadai dan berkualitas. Laporan keuangan yang baik dapat dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi yang baik dan terintegrasi.

Fakta menarik muncul pada masa krisis tersebut ternyata banyak usaha yang tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi yang tetap bisa bertahan sementara sebagian besar perusahaan besar menyatakan kebangkrutannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebangkrutan sebagai akibat krisis global tidak melihat besar kecilnya perusahaan. Menjadi sangat menarik untuk dilihat bagaimana peran dan keberadaan sistem informasi akuntansi di balik kemampuan Koperasi bisa bertahan sekalipun dalam situasi krisis. Berdasarkan data BPS bahwa capaian kontribusi koperasi PDB naik cukup signifikan dari 1,7% menjadi 4,48% dari jumlah koperasi sebanyak 152 ribu dan anggota 26 juta (Ningsih, dkk, 2020).

Koperasi diharapkan dapat menyusun laporan keuangan secara sederhana namun terstandar dan dapat menjadi acuan bagi kreditor untuk meminjamkan dana dan dapat menghimpun dana dari anggotanya. Kehadiran teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha dengan menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan. Menurut Hubeis (2009) Faktor umum yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil yaitu: Manajerial yang tidak kompeten, kurang memberikan perhatian, Sistem kontrol yang lemah dan kurangnya modal. Hasil penelitian Muhindo et al (2016), menunjukkan bahwa banyak bisnis kecil yang tidak menerapkan sistem informasi akuntansi sehingga mengakibatkan kinerja bisnis tersebut rendah. Almilia dan Brilliantien (2017) mengemukakan bahwa keberhasilan SIA dapat diukur dari kinerja sistem tersebut dalam perusahaan karena baik buruknya kinerja sebuah Sistem Informasi Akuntansi akan menentukan kepuasan dari pemakai dan pemakaian sistem informasi itu sendiri. Kinerja SIA yang baik mampu memenuhi kebutuhan pemakai sistem informasi, sehingga dapat membantu pemakai sistem menyelesaikan pekerjaannya (Srimindarti, 2012).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pemecahan masalah yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini mengacu kepada pendekatan siklus hidup pengembangan sistem (*system development life cycle/SDLC*) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kegiatan dimulai pada tahap awal yang fokus pada analisis permasalahan, dilanjutkan dengan pengembangan, penerapan dengan pelatihan dan pendampingan, pemantuan dan pemeliharaan serta tahap terakhir evaluasi dan pengembangan aplikasi ke versi update/terbaru lagi. Menurut Nurjanah (2021), dalam

membangun sistem informasi akuntansi tersebut diperlukan perencanaan serta pengendalian terhadap setiap kegiatan yang dilakukan koperasi. Dengan pengendalian risiko, koperasi harus didukung teknologi untuk membangun sistem informasi yang bersifat relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu. Hal tersebut menjadi faktor pendukung untuk mencapai laba yang lebih maksimal (Sarwengga, dkk. 2014).

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah sebuah entitas ekonomi yang beranggotakan sekelompok orang dengan kepentingan yang sama untuk menyediakan dan menjual produk serta membagikan keuntungannya berdasarkan kontribusi dari setiap anggotanya (Hill and Hill, 2005). Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010, p. 3). Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaat dan pemberdayaan sumber ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata secara material dan sosial. Dalam usahanya tersebut pemerintah terus-menerus berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang terutama di bidang perekonomian karena bidang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, karna keberhasilan bidang ekonomi merupakan cerminan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang salah satunya (Sarwengga, dkk.) yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pendirian koperasi merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian.

2.2. Akuntansi untuk Koperasi

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah petunjuk yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi yang mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggota dan non anggota dan/atau koperasi. Standar Laporan keuangan koperasi mengacu pada pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, menyatakan bahwa Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Usaha koperasi serba usaha beraneka ragam, kebanyakan meliputi retail, industri dan unit simpan pinjam. Dengan kegiatan usaha seperti ini, maka pelayanan penjualan dilakukan kepada anggota dan non anggota.

Laporan keuangan koperasi adalah salah satu pokok laporan yang harus disampaikan oleh pengurus dan pengawas kepada anggota. Oleh karena itu fungsi laporan keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas sangat penting. Dalam laporan keuangan koperasi serba usaha untuk laporan Penghitungan Hasil Usaha (PHU), memiliki format yang berbeda dengan format laporan rugi laba pada umumnya. Dalam format laporan penghitungan hasil usaha (rugi laba), harus ada pemisahan antara transaksi anggota dengan non anggota. Tidak semua software akuntansi koperasi dapat menerbitkan laporan PHU dengan memisahkan pendapatan dan beban pokok dari transaksi anggota dengan transaksi yang bukan dari anggota. Setiap tahun koperasi diwajibkan menyelenggarakan Rapat Akhir Tahun (RAT) dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas pengelolaan dan pengawasan koperasi untuk tahun buku yang sudah berakhir.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) edisi revisi tahun 2020. Standar ini dimaksudkan untuk

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas kecil dan menengah adalah entitas yang memenuhi kriteria: tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk: pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit. Menurut Niswonger, C. Rollin et al. (2000), sistem akuntansi (*accounting system*) adalah bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Dengan kata lain, menurut Simamora (2000) dalam (Sudarwanto, 2013), sistem akuntansi adalah proses terencana untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen.

3. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara tatap muka di kantor Kopkar PT. Pusri pada tanggal 18 November 2021, dengan peserta staff akuntansi dan keuangan Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Memberikan pemaparan (presentasi) tentang anggaran produksi; (2) Pelatihan dan praktek, pelatihan ini menitikberatkan pada kemampuan penyusun laporan keuangan dalam menggunakan aplikasi SIA dan menyusun laporan keuangan dan (3) Pendampingan, peserta UMKM akan diberikan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah dimana peserta diberikan materi mengenai akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan Koperasi. Dilanjutkan dengan metode tutorial dengan mensimulasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis database dan *Local Area Network* (LAN). Kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Jumlah peserta kegiatan ini sekitar 10 orang, dengan kriteria dalam meningkatkan kualitas dan melakukan pengembangan adalah staff akuntansi dan penyusun laporan keuangan. Keberhasilan kegiatan ini akan dievaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini juga akan diakhiri dengan permintaan respon dalam bentuk pengisian kuesioner untuk *feedback* kegiatan di masa yang akan datang. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah peserta mengetahui mekanisme penyusunan laporan keuangan serta mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP menggunakan aplikasi SIA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan

Kegiatan pengabdian dimulai dengan pembukaan oleh MC dilanjutkan kata sambutan dari Ketua Tim Pengabdian. Selanjutnya pemaparan materi dilakukan oleh Tim Pengabdian melalui ceramah, kemudian dilanjutkan dengan simulasi penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA berbasis database dan *Local Area Network*. Setelah sesi materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dimana para peserta juga dapat berkonsultasi dengan tim pengabdian atas kendala yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi SIA. Tim pengabdian juga bersedia untuk melakukan pendampingan setelah acara pelatihan. Pada saat sesi diskusi dan tanya jawab, peserta sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan seputar permasalahan tentang pengelolaan pencatatan transaksi keuangan yang dihadapi. Dari hasil diskusi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan atas pengelolaan yang terjadi di Kopkar PT. Pusri Palembang.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perkembangannya banyak mengalami hambatan, antara lain masalah manajemen dan permodalan yang di dalamnya menyangkut masalah pembukuan atau sistem akuntansi. Pada umumnya koperasi belum sepenuhnya mengetahui sistem pembukuan dan cara pelaporan keuangan yang baik. Sebagian besar mereka

membuat sistem pembukuan dan laporan sesuai dengan kemampuan para pengurunya atau pengelolanya sendiri. Padahal, sistem pembukuan dan laporan keuangan itu bukan hanya sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan keuangan koperasi, melainkan juga sebagai tolok ukur prestasi dan manfaat yang telah dicapai oleh koperasi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya bank, kreditur, dan kantor pajak.

Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana kondisi dan posisi perusahaan perusahaan.



Gambar 2. Penyampaian materi dan Pendampingan oleh tim pengabdian

Aplikasi Koperasi ini merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pengelola koperasi karyawan dalam mengelola data hasil usahanya. Koperasi mengalami kesulitan apabila anggota ingin mengetahui jumlah saldo pinjaman yang didapat serta jumlah angsuran yang masih berjalan karena belum tersedianya sistem untuk pengecekan hal tersebut kendala lainnya data di simpan masih menggunakan file excel yang dirasa kurang mampu mengatasi masalah pencarian data anggota, data pinjaman dengan cepat lalu pengurus mencari satu persatu saldo pinjaman dan data pembayaran oleh anggota (Abdillah, 2018). Solusi yang diberikan untuk permasalahan ini adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis database dan LAN. Aplikasi ini hanya bisa dilakukan oleh Admin dan Bendahara koperasi dengan melakukan Log in Admin. Setelah Log in sebagai Administrator, user akan diarahkan secara otomatis ke halaman Administrator, pada halaman ini disajikan transaksi terakhir yang telah dilakukan oleh admin tersebut atau admin lainnya. Dari input transaksi harian juga dapat dipilah secara otomatis oleh aplikasi sistem informasi akuntansi mana transaksi yang merupakan pendapatan usaha dan mana yang menjadi beban usaha. Bagian akuntansi hanya perlu menentukan jurnal transaksi-transaksi yang diinput secara benar lalu nanti akan terposting secara otomatis ke buku besar.

Koperasi Karyawan PT. Pusri LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31-Mar-2018		Koperasi Karyawan PT. Pusri LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31-Mar-2018	
		UNIT USAHA Simpan Pinjam	
		halaman 1	
A S E T		Pendapatan Usaha	
KAS		Pendapatan Usaha	420.000,00
Kas	244.551.603,33	Pendapatan bunga pinjaman	35.909.877,00
Kas Toko	101.037.041,00	Pendapatan tipe e	234.616.482,00
Sub Total : KAS	345.588.644,33	pendapatan bunga tipe m (suar gas)	43.539.290,00
Bank (Giro)		pendapatan bunga tipe sm	7.746.839,28
Giro - Bank Mandiri (Rek. 6837)	642.231.776,92	pendapatan bunga pinjaman tipe k	46.834.248,87
Giro - Bank Mandiri (Rek. 112-0094011629)	254.476.815,20	Pendapatan Bunga Bank	1.728.932,32
Giro - Bank Mandiri (Rek. 717)	308.915.253,11	Jumlah Pendapatan Usaha	365.797.659,47
Giro - Bank Muamalat	6.339.067,00	Beban Operasional Usaha	
Giro - Bank Syariah Mandiri (175)	107.488.323,04	Cuti	(4.322.412,00)
Giro - Bank Bukopin (Rek. Pemampungan)	81.067,00	Makan, Minum dan Transport	(100.000,00)
Giro - Bank Bukopin	145.559,00	Pengobatan	(1.903.611,00)
Giro - Bank Saudara	4.118.340,00	Akuntansi Tenaga Kerja	(3.341.981,00)
Giro - Bank BRI	5.720.613,00	Jasa Lainnya	(1.600.000,00)
Giro - Bank Syariah Mandiri (5571)	49.849,43	Alat Tulis Kantor	(91.000,00)
Giro - Bank Syariah Mandiri (3986)	785.897,15	Biaya Telekomunikasi	(200.000,00)
Giro - Bank BRI Syariah	7.383.543,92	Gaji dan Tunjangan	(53.828.307,00)
Giro - Bank BNI	27.299.912,00	biaya Material	(42.000,00)
Giro - Bank Mandiri (Rek1585)	943.399.420,00	Biaya administrasi	(3.500.001,56)
Sub Total : Bank (Giro)	2.317.131.432,74	Pajak (bank)	(279.480,77)
Bank (Tabungan)		Jumlah Beban Operasional Usaha	(60.168.793,33)
Tabungan - Bank Syariah Mandiri (552)	6.229,46		

Gambar 3. Laporan Keuangan (*output*) dari pengisian aplikasi SIA Kopkar

Selain itu bagian akuntansi harus memasukkan nilai yang benar karena apa yang diinput itulah yang nantinya akan diproses sebagai keluaran. Dari proses simulasi memasukkan transaksi penerimaan dan pengeluaran secara lengkap selama periode usaha dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan yang otomatis muncul dari hasil input data. Laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi lebih cepat karena secara otomatis entry harian transaksi dapat menghasilkan output berupa laporan laba dan rugi untuk mengetahui hasil usaha dan juga berupa laporan posisi keuangan (neraca) untuk Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang mengetahui aset dan hutang beserta modalnya.

Sebagai bentuk dukungan untuk Kopkar PT. Pusri dalam penyusunan laporan keuangan berbasis database dan Local Area network, tim pengabdian menginstallkan langsung di empat perangkat komputer yang digunakan oleh operator/user. Nantinya setelah pelatihan peserta masih tetap dapat berdiskusi dan bertanya kepada tim pengabdian melalui Whatsapp sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi penerapan aplikasi pelaporan keuangan berbasis database dan Local Area Network.



Gambar 4. Dokumentasi Bersama Peserta

4.2. Pembahasan Permasalahan

Kendala yang dihadapi adalah penyusun laporan keuangan belum sepenuhnya mengetahui sistem pembukuan dan cara pelaporan keuangan yang baik. Sebagian besar mereka membuat sistem pembukuan dan laporan sesuai dengan kemampuan para pengurusnya atau pengelolanya sendiri. Permasalahan yang ditemukan adalah pengelola koperasi sekolah belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Untuk itu, pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA ini mempermudah bagian akuntansi karena output dari aplikasi sudah sesuai dengan format menurut SAK ETAP dan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Beberapa tantangan yang dihadapi Kopkar dalam mengelola SDM adalah perlunya pengembangan kompetensi pegawai secara regular sehingga penyusun laporan keuangan dibekali dengan pengetahuan dan dapat meningkatkan kinerja Kopkar. Selain itu, di Era digitalisasi ini, para penyusun laporan keuangan dapat memanfaatkan internet dan teknologi untuk mencari informasi mengenai pengembangan Koperasi mereka agar lebih maju (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018).

Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah utama Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah. Umumnya anggota Koperasi merasa cukup dengan usaha sendiri-sendiri. Padahal pelbagai masalah yang dihadapi mereka akan lebih mudah terpecahkan melalui upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama. Rendahnya keinginan mereka untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya tersebut, terjadi karena pemahaman mereka mengenai apa itu Koperasi masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari

bahwa dengan rendahnya partisipasi mereka di dalam Koperasinya akan menyebabkan tetap kecilnya sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk menjalankan usaha sehingga fungsi Koperasi tidak dapat dirasakan. Rendahnya pemahaman mereka akan Koperasi diduga disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan terhadap anggota Koperasi. Hal ini disebabkan karena pengurus beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa manfaat untuk pribadi mereka; b. Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim; c. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim; d. Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor. Berdasarkan data World Economic Forum pada tahun 2008, daya saing produk Indonesia masih tergolong rendah. Saat itu, Indonesia menduduki peringkat 55 dari 134 negara. Sebagai gambaran, Singapura menduduki peringkat ke-5, Thailand menduduki peringkat ke-34 dan Malaysia menduduki peringkat ke-21 dari daya saingnya. Kondisi ini akan menyebabkan tingkat produksi Koperasi (yang merupakan salah satu badan usaha di Indonesia) mengalami tekanan dan membuat Koperasi sulit bertumbuh. Kondisi ini diduga disebabkan oleh: (1) Lemahnya keterampilan teknis dan penguasaan teknologi di kalangan SDM, (2) Terbatasnya produk berbasis teknologi tinggi, (3) Produk yang dihasilkan umumnya belum memiliki standar mutu, (4) Akses modal yang terbatas, (5) Akses dan jejaring pemasaran yang masih terbatas dan kurang berkembang (Sitompul, 2010).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan yang baik akan memiliki dampak yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan usaha dan juga bagi pengambilan keputusan manajemen. Dalam pelaksanaan pengabdian ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kendala teknis yang dihadapi staff saat penginputan transaksi keuangan dan penarikan data. Dalam pelaksanaan pengabdian ini peserta aktif berdiskusi berkaitan dengan kendala yang dihadapi dan bersama-sama dengan tim pengabdian membahas solusi terbaiknya. Saran untuk kegiatan ini adalah perlu adanya pendampingan lanjutan bagi staff pengelola akuntansi dan keuangan dalam menetapkan, menghitung, memperhitungkan berkaitan dengan transaksi usahanya. Nantinya tim pengabdian secara bertahap akan tetap melakukan pemantauan dan *maintainance* sistem ke Koperasi Karyawan PT. Pusri Palembang secara berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini didukung oleh anggaran DIPA dan rincian belanja satuan kerja Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan kami dari Universitas Sriwijaya yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini, atas komentar yang sangat menyempurnakan naskah.

REFERENSI

- Abdilla, J. & Sarwengga, O. B. (2018). Aplikasi Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Koperasi Spbni Syariah. *Jurnal LPKIA*. 2(1), 13–19.
- Almilia, L.S. & Brilliantien, I. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*. 9(2), 1-7.
- Carter, W, K. (2009). *Akuntansi Biaya*. Buku 1. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Devie, Tarigan, & Sondang. (2019). Application of Accounting Concepts in Workplace, *Journal of International Business Research*, 9 (3), 89-104.
- Gelinas, S., & Oram. (2019). *Accounting Information System*. 4th Ed. South-Western College Publishing.
- Hanny, K. Kezia, Benny, F., & Waruwu, R.P. (2017). Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi* . 9(1). 54-73.

- Hubeis, M. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hunton, J.E. and Price, K.H. (2016). A Framework for Investigating Involvement Strategies in Accounting Information System Development. *Behavioral Research in Accounting*. 6(2), 128-132.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Ilustrasi Laporan Keuangan dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: IAPI.
- Tarigan, J. (2010). *Value Driven Accounting (Acc V.2)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Keputusan Presiden RI No. 99. (1998). *Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Muhindo, A., Mzuza, M.K., & Zhou, J. (2016). Impact of Accounting Information Systems on Profitability of Small Scale Businesses: A Case of Kampala City in Uganda. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*. 3(2), 185-192.
- Muzdalifa, I., Rahma, I., A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(1), 1-24.
- Ningsih, R., Rukiastiandar, S., Sayekt, K., Linasari, M. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Peminjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Tirta Mukti PDAM Bekasi. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*. 6(1), 89-94. DOI: <https://doi.org/10.31294/jtk.v6i1.6823>.
- Niswonger, R.C., Warren, C.S., Reeve, J.M., Fess, P.E. (2000). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurjanah, N.Y.S. & Supriatna, I. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Simpan dan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Kencana (KSPJK). *Indonesian Accounting Literacy Journal*. 1(2), 377–396.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12. (2015). *Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Romney, Marshall, B. dan Steinbart. (2020). *Accounting Information System*. 14th Edition. Pearson Education, Inc.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi 2 Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwengga, O., Abdillah, J., & Yuniar, I. (2014). Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam Berbasis WEB (Studi Kasus Pada Koperasi Bina Sejahtera Bandung). *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri*. 1(2), 28 – 33.
- Sekaran, U. (2000). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, H. (2000), *Manajemen Pemasaran Internasional (jilid 1)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sitompul, A. (2010). Strategi dan Langkah-Langkah UMKM dan Koperasi dalam Menghadapi ACFTA, *Jurnal INFOKOP*. 18(2), 40-51.
- Srimindarti, C. (2012). Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Ditinjau dari Kepuasan Pemakai dan Pemakaian SIA yang Dipengaruhi oleh Partisipasi Pemakai, Kepuasan, Pelatihan dan Pemakai SIA. *Jurnal Bisnis dan Ekonom*. 17(1), 514-546.
- Sudarwanto, A. (2013). *Akuntansi Koperasi, Pendekatan Praktiis Penyusunan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surya, R.A.S. (2012). *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9. (1995). *Tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. (2008). *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2012). *Tentang PerKoperasian*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.